



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Laporan ini sebagai media informasi public atas pencapaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memandai atas hasil analisa pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pangandaran, 17 Pebruari 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004

IKHITISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang memuat rencana, capaian, realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perubahan tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik
Indikatornya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 mendapatkan Nilai 85,54 atau kategori A dan capaian kinerja sebesar 122,20%;
2. Sasaran Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal
Indikatornya Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal dengan realisasi kinerja sebesar 60% dan capaian kinerja 85,71%;
3. Sasaran Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif
Indikatornya Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan realisasi kinerja sebesar 45,83% dan capaian kinerja 91,65%;
4. Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata
Indikatornya Jumlah PAD Sektor Pariwisata realisasi kinerja sebesar Rp 13.786.568.250 dan capaian kinerja 50,13%;
5. Sasaran berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC
Indikatornya Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata realisasi kinerja sebesar 63,41% dan capaian kinerja sebesar 79,26%.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada, mempertahankan dan meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tentang SAKIP, serta kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel;
2. Perlu ditingkatkan kualitas inventarisasi objek pemanjuaan kebudayaan lokal sampai pada klasifikasi yang sudah memiliki dan regulasi yang jelas;
3. Perlu dibuat sistem yang cepat tanggap terutama dalam mengatasi berita hoax dan isu-isu negative supaya wisatawan cepat mendapatkan informasi terbaru;
4. Perlu adanya pengembangan variasi daya tarik wisata selain daya tarik wisata bahari dan pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata yang memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wistawan;
5. Perlu update data 16 subsektor ekonomi ekonomi kreatif dan pelakunya untuk lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pangadaran;
6. Perlu adanya rencana aksi yang fokus dan komitmen dari semua SKPD dalam upaya pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D supaya semua kriteria dan indikator bisa masuk kategori green pada saat assessment.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangadaran di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Struktur Organisasi.....	2
1.5. Tugas dan Fungsi.....	4
1.6. Isu Strategis	5
1.7. Keadaan Pegawai.....	6
1.8. Keadaan Sarana dan Prasarana.. ..	7
1.9. Keuangan.....	14
1.10. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	16
2.1.1 Visi Misi Kabupaten Pangandaran.....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	21
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	25
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	31
2.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	32
2.3.2 Alokasi Anggaran Persasaran Strategis.....	32
2.4. Instrumen Pendukung	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	33
3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	34
3.2.1 Sasaran : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik.....	34
3.2.2 Sasaran : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Lokal.....	38

	3.2.3 Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif....	42
	3.2.4 Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata.....	45
	3.2.5 Sasaran : Berkembangnya Destinasi Wisata Untuk Memperoleh Pengakuan GSTC.....	52
	3.3. Realisasi Anggaran	59
BAB IV	PENUTUP	
	4.1. Penutup	62

DAFTAR TABEL

1.1.	Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	7
1.2.	Sarana dan Prasarana	9
1.3.	Aset Lainnya	13
2.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	21
2.2.	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Disparbud Kabupaten Pangandaran	22
2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Bupati	28
2.4.	Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas	29
2.5.	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Kepala Dinas.....	29
2.6.	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang ADP dan dan Kepala Dinas	30
2.7.	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Inparekraf dan Kepala Dinas	30
2.8.	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepala Dinas.....	28
2.9.	Terget Belanja Disparbud Kab. Pangandaran Tahun 2020	32
2.10.	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran	32
3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2020	33
3.3.	Rumusan Indikator Dan Formulasi Prhitungan.....	34
3.4.	Target Realisasi Kinerja Tahun 2020	35
3.5.	Lhe Implementasi Sakip Disparbud Tahun 2019.....	35
3.6.	Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 1.....	36
3.7.	Kegiatan Pendukung Sasaran	37
3.8.	Rumusan Indikator Dan Formulasi Perhitungan	38
3.9.	Target Realisasi Kinerja Tahun 2020	38
3.10.	Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 2.....	40
3.11.	Kegiatan Pendukung Sasaran	41
3.12.	Rumusan Indikator dan Formulasi Prhitungan.....	42
3.13.	Target Realisasi Kinerja Tahun 2020	43
3.14.	Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 3.....	44
3.15.	Kegiatan Pendukung Sasaran	44
3.16.	Rumusan Indikator Dan Formulasi Perhitungan	45
3.17.	Target Realisasi Kinerja Tahun 2020	46
3.18.	Jumlah Pad Pariwisata	46
3.19.	Anggaran Pendukung Sasaran Stategis 4.....	49

3.20. Kegiatan Pendukung Sasaran	50
3.21. Rumusan Indikator dan Formulasi Prhitungan.....	52
3.22. Target Realisasi Kinerja Tahun 2020	52
3.23. Anggaran Pendukung Sasaran Strrategis 5	56
3.24. Kegiatan Pendukung Sasaran	57
3.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Persasaran Tahun 2020.....	60
3.26. Analisis Efektivitas.....	60
3.27. Analisis Efisiensi.....	61

DAFTAR GAMBAR

1.1. Struktur Organisasi	4
3.2. Kegiatan Safari Budaya atau Diplomasi Kebudayaan.....	42
3.3. AKB Pelaku Seni.....	42
3.4. Pembinaan Pelaku Kreatif	45
3.5. Pembinaan Pelaku Kreatif	45
3.6. Penataan Pantai Karapyak (DAK)	51
3.7. Penataan Pintu Tol Gate	51
3.8. Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penilaian GSTC-D	57
3.9. Kegiatan Persiapan Pembentukan Penilaian GSTC-D	57
3.10. Website Promosi Pariwisata	58
3.11. Media Sosial Promosi Pariwisata	58
3.12. Youtube Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	59
3.13. Riset Analisa Kepuasan Wisatawan.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pan dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (dasar Hukum Provinsi dan Pemda)

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja yang seharusnya dan telah dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;
2. Mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun 2020.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 adalah:

- a. Memempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan

yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;

- b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

1.3 Dasar Hukum

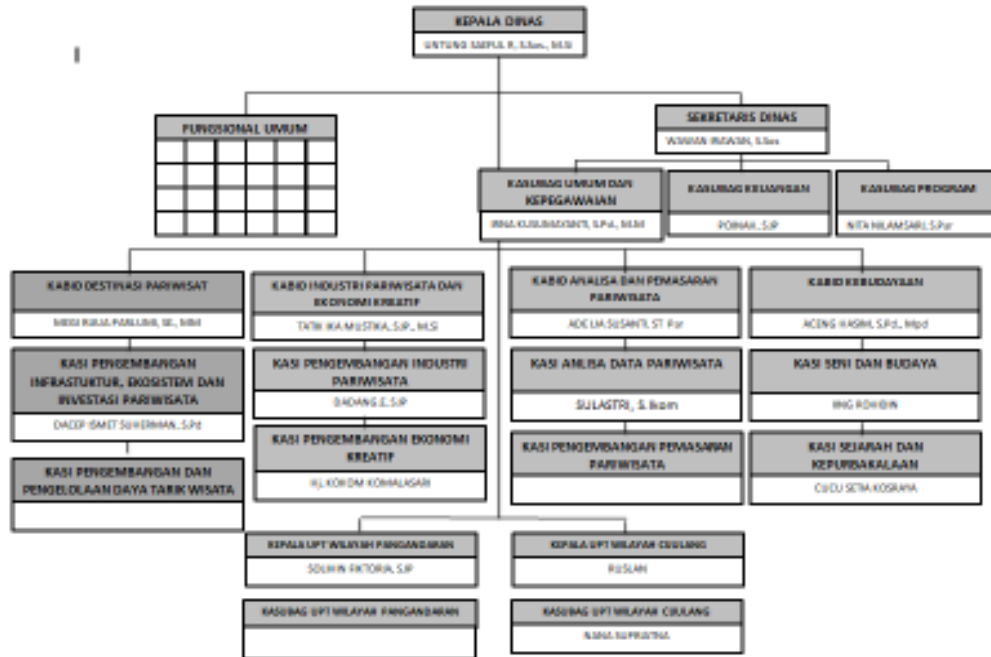
Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan dengan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - 2) Seksi Analis Data Pariwisata.
- d. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata.
- e. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - 1) Seksi Seni dan Budaya;
 - 2) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- g. UPT terdiri dari:
 - 1) UPT Wilayah Cijulang;
 - 2) UPT Wilayah Pangandaran.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.5 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Buoati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugasdan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melalui Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
2. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

1.6 Isu Strategis

Setelah identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dilakukan, maka untuk menghasilkan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Pangandaran dilakukan analisis SWOT. Adapun Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tingkat pelayanan yang lebih baik terkait dengan pengembangan sektor – sektor yang merupakan aktivitas kegiatan masyarakat terbesar, yaitu sektor pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan;
2. Menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang berskala internasional – sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia;
3. Mengembangkan potensi ekonomi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu mendorong kedewasaan dan kreatifitas ekonomi yang lebih besar, yang bisa dijadikan dasar untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian kabupaten secara berkesinambungan dimasa yang akan datang, karena memiliki keterkaitan yang erat baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang;
4. Membangun pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran dengan adanya dukungan dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan kementerian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri;
5. Peningkatan kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke destinasi wisata dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan kepariwisataan secara inklusif;
6. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pariwisata Kabupaten Pangandaran agar mampu berdaya saing sehingga mampu mendorong pembangunan yang efisien dan efektif serta berkelanjutan;
7. Mengembangkan program kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata.;
8. Merancang zonasi pengembangan kepariwisataan guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan;
9. Meningkatkan implementasi MEA sehingga bisa meningkatkan peluang Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia;

10. Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat local;
11. Mempersiapkan daya saing masyarakat guna menghadapi era globalisasi;
12. Mempertahankan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Pangandaran akibat adanya kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi;
13. Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana;
14. Menjaga kestabilan perekonomian sehingga tidak mempengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik di Kabupaten Pangandaran;
15. Mengembangkan potensi Kabupaten Pangandaran yang memiliki daerah tujuan wisata (DTW) yang bervariasi, garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama dan aktivitas Pariwisata tersebar merata di seluruh kecamatan;
16. Ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif;
17. Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif; dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah;
18. Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam;
19. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai untuk industry kreatif, mudah diakses dan kompetitif;
20. Perluasan pasar bagi karya kreatif;
21. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif untuk pengembangan kreatifitas;
22. Kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

1.7 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai akhir Tahun 2020 adalah sebanyak 32 pegawai. Adapun 33 orang pegawai terdiri dari 17 pejabat struktural dan 14 fungsional umum, untuk penempatan pegawai di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Pangandaran sebanyak 25 orang, di UPT Wilayah Cijulang sebanyak 4 orang dan UPT Wilayah Pangandaran sebanyak 3 orang.

A. Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

- 1) Pasca Sarjana : 5 Orang
- 2) Sarjana/Diploma IV : 11 Orang
- 3) SMA sederajat : 16 Orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural:

- 1) Pejabat Eselon II : 1 Orang
- 2) Pejabat Eselon III : 5 Orang
- 3) Pejabat Eselon IV : 11 Orang

C. Berdasarkan Pangkat dan Golongan:

- 1) Pembina, IV/a : 5 Orang
- 2) Penata Tk. I, III/d : 6 Orang
- 3) Penata, III/c : 6 Orang
- 4) Penata Muda Tk. I, III/b : 2 Orang
- 5) Penata Muda, III/a : 2 Orang
- 6) Pengatur Tk. I, II/d : 5 Orang
- 7) Pengatur, II/c : 5 Orang
- 8) Pengatur Muda Tk. I, II/b : 1 Orang

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai target yang telah ditentukan.

1.8 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didukung oleh sarana dan prasarana dengan total asset yang dimiliki sebesar Rp 123.492.039.889 yang meliputi:

Tabel 1.1
Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	URAIAN	UNIT	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	ASET TETAP	99	113.058.568.897,00	
	Tanah	13	2.667.788.110,00	

01	Tanah	13	2.667.788.110,00	
	Peralatan Dan Mesin	61	6.666.329.428,00	
01	Alat Besar	1	2.350.000,00	
02	Alat Angkutan	23	2.416.275.171,00	
03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	5.900.000,00	
04	Alat Pertanian	6	4.665.938,00	
05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	81	1.530.606.699,00	
06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	05	551.477.697,00	
07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	17	51.880.000,00	
08	Alat Laboratorium	18	1.245.404.028,00	
09	Alat Persenjataan	9	28.350.000,00	
10	Komputer	96	534.368.895,00	
11	Alat Eksplorasi	-	-	
12	Alat Pengeboran	-	-	
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
15	Alat Keselamatan Kerja	-	-	
16	Alat Peraga	-	-	
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	
18	Rambu - Rambu	3	295.051.000,00	
19	Peralatan Olah Raga	-	-	
	Gedung Dan Bangunan	49	95.989.527.992,00	
01	Bangunan Gedung	27	91.117.145.835,00	
02	Monumen	16	3.648.138.657,00	
03	Bangunan Menara	1	85.844.000,00	
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5	1.138.399.500,00	
	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	33	7.131.089.567,00	
01	Jalan Dan Jembatan	20	5.246.089.339,00	
02	Bangunan Air	12	812.282.228,00	
03	Instalasi	-	-	
04	Jaringan	1	1.072.718.000,00	
	Aset Tetap Lainnya	32	115.790.800,00	
01	Bahan Perpustakaan	18	1.927.000,00	
02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	14	113.863.800,00	
03	Hewan	-	-	

04	Biota Perairan	-	-	
05	Tanaman	-	-	
06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11	488.043.000,00	
01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11	488.043.000,00	
	ASET LAINNYA	89	10.433.470.992,00	
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	
	Aset Tidak Berwujud	11	1.149.590.000,00	
01	Aset Tidak Berwujud	11	1.149.590.000,00	
	Aset Lain-Lain	78	9.283.880.992,00	
01	Aset Lain-Lain	78	9.283.880.992,00	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2020

Sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No	Nama Bidang Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Alat Bantu	Pompa	1	Kondisi Baik
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	Kondisi Baik
3		Kendaraan Bermotor Penumpang	4	Kondisi Baik
4		Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3	Kondisi Baik
5		Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	Kondisi Baik
6		Kendaraan Bermotor Khusus	2	1 Baik 1 Rusak Berat
7	Alat Angkutan Apung Bermotor	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	2	Kondisi Baik
8		Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	4	2 Baik 2 Rusak Berat
9	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	16	1 Baik 15 Rusak berat
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Perkakas Bengkel Kerja	1	Kondisi Baik
11	Alat Ukur	Alat Ukur/Pembanding	1	Kondisi Baik
12	Alat Pengolahan	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	6	Kondisi Baik
13	Alat Kantor	Mesin Ketik	13	4 Baik 7 Rusak Berat
14		Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5	Rusak Berat
15		Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19	Kondisi Baik

16		Alat Kantor Lainnya	31	8 Baik 23 Rusak Berat
17	Alat Rumah Tangga	Meubelair	559	458 Baik 101 Rusak Berat
18		Alat Pengukur Waktu	9	4 Baik 5 Rusak Berat
19		Alat Pembersih	79	Kondisi Baik
20		Alat Pendingin	49	42 Baik 7 Rusak Berat
21		Alat Dapur	2	1 Baik 1 Rusak Berat
22		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93	73 Baik 20 Rusak berat
23		Alat Pemadam Kebakaran	1	Kondisi Baik
24	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Meja Kerja Pejabat	2	Kondisi Baik
25		Meja Rapat Pejabat	5	Kondisi Baik
26		Kursi Kerja Pejabat	4	Kondisi Baik
27		Lemari Dan Arsip Pejabat	15	Kondisi Baik
28	Alat Studio	Peralatan Studio Audio	52	Kondisi Baik
29		Peralatan Studio Video Dan Film	22	Kondisi Baik
30	Alat Komunikasi	Alat Komunikasi Telephone	62	54 Baik 8 Rusak Berat
31		Alat Komunikasi Lainnya	1	Kondisi Baik
32	Peralatan Pemancar	Peeralatan Antena Shf/Parabola	1	Kondisi Baik
33		Sumber Tenaga	1	Kondisi Baik
34	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran Umum	10	Kondisi Baik
35		Alat Kedokteran Gigi	3	Rusak Berat
36		Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	6	Kondisi Baik
37		Alat Kedokteran Poliklinik	4	Rusak Berat
38	Alat Kesehatan Umum	Alat Kesehatan Matra Laut	2	1 Baik 1 Rusak Berat
39		Alat Kesehatan Kepolisian	2	Kondisi Baik
40	Unit Alat Laboratorium	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	2	Rusak Berat
41		Alat Laboratorium Umum	3	Rusak Berat
42		Alat Laboratorium Biologi Perairan	96	92 Baik 4 Rusak Berat
43		Alat Laboratorium Lain	4	Rusak Berat
44	Alat Peraga Praktek Sekolah	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	12	Kondisi Baik
45		Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	4	Kondisi Baik

46		Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	60	Kondisi Baik
47	Alat Khusus Kepolisian	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	9	Kondisi Baik
48	Komputer Unit	Komputer Jaringan	1	Kondisi Baik
49		Personal Komputer	62	52 Baik 10 Rusak Berat
50	Peralatan Komputer	Peralatan Mini Komputer	1	Rusak Berat
51		Peralatan Personal Komputer	54	43 Baik 11 Rusak Berat
52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rambu Tidak Bersuar	3	Kondisi Baik
53	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor Permanen	16	10 Baik 1 Kurang Baik 5 Rusak Berat
54		Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	45	20 Baik 8 Kurang Baik 17 Rusak Berat
55	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Kondisi Baik
56	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Kondisi Baik
57		Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lain-Lain	2	Kondisi Baik
58		Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	1	Kondisi Baik
59	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Kondisi Baik
60	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	4	Kondisi Baik
61		Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	3	Kondisi Baik
62	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	11	Kondisi Baik
63		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1	Rusak Berat
64	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Gedung Pos Jaga Permanen	4	1 Baik 2 Kurang Baik 1 Rusak Berat
65		Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	Kondisi Baik
66		Gedung Menara Peninjau Permanen	1	Kondisi Baik
67		Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain-Lain	6	5 Baik 1 Rusak Berat
68	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Kondisi Baik
69		Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	3	2 Baik 1 Rusak Berat
70	Bangunan Terbuka	Bangunan Terbuka Lain-Lain	17	Kondisi Baik

71	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	16	7 Baik 9 Rusak Berat
72		Gedung Pengujian Kendaraan Lainnya	5	4 Baik 1 Rusak Berat
73		Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain-Lain	2	Kondisi Baik
74	Bangunan Stasiun Bus	Bangunan Stasiun Bus Lain-Lain	1	Kondisi Baik
75	Taman	Taman Lain-Lain	6	5 Baik 1 Rusak Berat
76	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	12	11 Baik 1 Rusak Berat
77		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	1	Kondisi Baik
78	Hotel	Hotel Permanen	5	3 Baik 2 Rusak Berat
79	Motel	Motel Lain-Lain	3	1 Baik 2 Rusak Berat
80	Tugu	Tugu Peringatan Lainnya	6	5 Baik 1 Rusak Berat
81		Bangunan Pintu Gerbang	11	Kondisi Baik
82		Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	2	Kondisi Baik
83	Bangunan Peninggalan	Tempat Ibadah Bersejarah Lainnya	1	Kondisi Baik
84	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lain-Lain	5	1 Baik 4 Rusak Berat
85	Pagar	Pagar Lain-Lain	6	Kondisi Baik
86	Jalan	Jalan Kabupaten	1	Kondisi Baik
87		Jalan Tol	1	Kondisi Baik
88		Jalan Khusus	26	15 Baik 11 Rusak Berat
89	Jembatan	Jembatan Penyeberangan	1	Rusak Berat
90	Bangunan Air Irigasi	Bangunan Pengambilan Irigasi	1	Kondisi Baik
91	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	3	2 Baik 1 Rusak Berat
92	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	14	1 Baik 13 Rusak Berat
93	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1	Kondisi Baik
94		Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	6	3 Baik 3 Rusak Berat

95	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	3	Kondisi Baik
96	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5	2 Baik 3 Rusak Berat
97	Bangunan Air Kotor	Bangunan Pembuang Air Kotor	1	Rusak Berat
98	Instalasi Gardu Listrik	Instalasi Gardu Listrik Induk	2	Rusak Berat
99	Jaringan Listrik	Jaringan Distribusi	3	1 Baik 2 Rusak Berat
100	Bahan Perpustakaan Tercetak	Buku Umum	18	Kondisi Baik
101	Barang Bercorak Kesenian	Alat Musik	14	Kondisi Baik

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2020

Sedangkan aset berupa tanah, bangunan dan lainnya adalah sebagai berikut:

Table 1.3
Aset Lainnya

NO	NAMA BIDANG BARANG	TAHUN PENGADAAN	LUAS (M2)	LOKASI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1990	750	Objek Wisata Pangandaran
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1990	897	Objek Wisata Pangandaran
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2012	2731.57	Objek Wisata Pangandaran
4	Tanah Bangunan Dermaga	1994	1612	Cijulang (OW. Green Canyon)
5	Tanah Bangunan Dermaga	1994	100	Cijulang (OW. Gre en Canyon)
6	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1994	4714	Objek Wisata Pangandaran
7	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1994	232079	Cijulang (OW. Green Canyon)
8	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1995	19000	Objek Wisata Batukaras
9	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1997	2550	Objek Wisata Pangandaran
10	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2000	4750	Objek Wisata Pangandaran
11	Tanah Kosong yang tidak diusahakan	1960	10000	Objek Wisata Pangandaran
12	Tanah Lapangan Parkir Lain-lain	2000	1665	Objek Wisata Pangandaran
13	Tanah Lapangan Parkir Lain-lain	2000	7700	Objek Wisata Pangandaran

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2020

Selain kedua aset ya tersedia pada tabel diatas, Dinas Pariwisata memiliki aset lain berupa seperti website yang digunakan untuk kebutuhan promosi pariwisata. Secara kuantitas aset yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran terlihat banyak namun banyak juga yang dalam kondisi kurang layak. Dalam penggunaannya tidak hanya

digunakan oleh pegawai yang ada di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran namun ada yang dipakai oleh UPT dan lainnya seperti satuan tugas wisata tirta. Untuk kendaraan roda empat yang digunakan oleh pegawai di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran hanya ada 4 dan roda 2 ada 6, sisinya digunakan oleh satuan tugas wisata tirta untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Setelah dianalisa masih banyak sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang belum terpenuhi seperti kendaraan roda 4 dan 2, laptop/computer, printer serta sarana dan parasana lainnya.

1.9 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan Dana Alokasi Khusus Kementerian Pariwisata. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp 15.825.306.807,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp 13.794.953.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.379.740.193,00 pada perubahan anggaran tanggal 26 September 2020 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran total belanja sebesar Rp 25.132.530.636,45 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp 19.900.049.071,45 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 5.232.481.565,00. Adapun realisasi anggaran belanja langsung sebesar 15.147.298.522,00 (76.12%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.369.471.094,00 (64,40%).

1.10 Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematisa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2020 sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mencapai tujuan dan sasaran tersebut serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang alasan dan dasar pembuatan LKIP, struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, potensi dan sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dalam penggunaan sumber daya yang ada untuk pencapaian sasaran organisasi atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 dan perbandingan hasil evaluasi dengan tahun sebelumnya, akhir rencana strategis ataupun dengan standar yang ada.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan atau kendala serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka pada tahun 2018 untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pangandaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menyusun atau melakukan perubahan Rencana Strategis yang dimulai pada tahun 2018 sampai 2021. Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran dan strategis bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang harus dilakukan secara harmonis, terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran direvisi setiap tahun dengan melihat isu-isu strategis yang terkini melalui pembentukan tim revisi renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

A. Visi

Visi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 yaitu:

**“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA
BERKELAS DUNIA”**

KABUPATEN PANGANDARAN : Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang

- TUJUAN WISATA** : Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing
- BERKELAS DUNIA** : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC)

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

B. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima. Menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Mewujudkan penataan ruangan yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, sewerage, dan lain-lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antara objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintah cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal. Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian, dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu. Melihat Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut yaitu menjalankan **Misi 1, 4 dan 6**.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Kualitas produk wisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran belum secara menyeluruh dikembangkan, hal ini akan menghambat terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pangandaran dan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional : Pangandaran-Nusakambangan dan Sekitarnya sesuai dengan PP No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- b. Kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima pengembangan kepariwisataan akan berpengaruh pada Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dalam membangun destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya melalui prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif dan berkelanjutan.

2. Faktor Pendorong

- a. Kabupaten Pangandaran berada dalam tahapan Penguatan dan Penataan Organisasi Pengelolaan Destinasi Wisata melalui Pembentukan Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata (FTKP) Kabupaten Pangandaran. Hal ini diharapkan agar masyarakat Kabupaten Pangandaran akan lebih siap dalam melakukan dan menerima pengembangan kepariwisataan.
- b. Tingginya potensi kunjungan wisata akan mendukung Kabupaten Pangandaran yang termasuk dalam Konstelasi Great Bandung, dengan penekanan terhadap pendistribusian wisatawan yang diharapkan mampu menyebar keberbagai Destinasi Wisata di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran
- c. Adanya Reaktivasi Jalur Kereta Api Banjar-Pangandaran-Cijulang. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru. Pengembangan Pelabuhan Bojong Salawe. Pembangunan Airstrip Pangandaran akan mendorong konektivitas antar destinasi wisata menuju dan di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran.
- d. Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata Pangandaran Tahun 2009-2018 dengan visi : “Kabupaten Pangandaran sebagai Destinasi Wisata Terkemuka secara Global berbasis pada wisata alam dan budaya, sekaligus menjadi tempat tinggal yang nyaman dan agamis” menjadi pendorong terwujudnya pengembangan destinasi wisata Kabupaten Pangandaran yang berkelas dunia.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani							
1	Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	CC	B	BB	BB
Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal							
2	Memajukan Kebudayaan Lokal	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan lokal	25%	35%	70%	80%
Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan							
3	Meningkatkan pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD sektor Pariwisata	25 M	25 M	27,5 M	30 M
4	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	20%	30%	50%	70%
5	Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC	Persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata	40%	60%	80%	100%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2020

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

VISI : "KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA"			
MISI KESATU : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat SKPD
			Pembayaran tagihan rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Menjaga kebersihan kantor
			Pemenuhan kebutuhan tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3
			Pemenuhan kebutuhan ATK
			Pemenuhan kebutuhan pengadaan dokumen dan cetak spanduk
			Pemenuhan kebutuhan Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Pemenuhan kelengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur mengenai informasi pemerintahan dan perundang-undangan
			Pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman untuk kegiatan
			Peningkatan keikutsertaan dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			Peningkatan keikutsertaan dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
			Peningkatan kualitas peralatan kantor
			Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Tangga instansi
			Peningkatan keamanan kantor
			Peningkatan kualitas pengoperasian aplikasi pemerintahan
			pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasi Anggaran
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
			Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
			Peningkatan kelengkapan Perlengkapan Gedung Kantor
			Peningkatan kelengkapan Peralatan Gedung Kantor
			Penyediaan Mebeleur
			Peningkatan kualitas Gedung Kantor
			Peningkatan kualitas Kendaraan Dinas/Operasional
			Peningkatan kualitas Peralatan Gedung Kantor
			Pemenuhan kebutuhan akan komputer
			Penataan Halaman dan Taman Kantor Dinas
			Penyediaan Alat-alat studio penunjang kerja
			Peningkatan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal aparatur
			sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Peningkatan kualitas dan produktivitas aparatur
			Peningkatan kerjasama aparatur
			Pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			Pemenuhan kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan
			Pemenuhan kebutuhan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
			Penyediaan mesin/kartu absensi
MISI KEEMPAT : Memperkuat Ketahanan nilai-nilai kearifan lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memajukan Kebudayaan Lokal	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Meningkatkan Perlindungan dan keberlanjutan kebudayaan lokal	Inventarisasi Kebudayaan lokal

			perlindungan hak kekayaan intelektual Kebudayaan lokal
			pemeliharaan Kebudayaan lokal
			Penyelamatan Kebudayaan lokal
			Publikasi Kebudayaan lokal
		Meningkatkan Pengembangan kebudayaan lokal	penyebarluasan kebudayaan lokal
			pengkajian kebudayaan lokal
			pengayaan keberagaman kebudayaan lokal
		Meningkatkan Pemanfaatan kebudayaan lokal	internalisasi nilai budaya lokal
			inovasi kebudayaan lokal
			peningkatan adaptasi kebudayaan lokal menghadapi perubahan
			komunikasi lintas budaya; kolaborasi kebudayaan lokal
			pengolahan Kebudayaan lokal menjadi produk
			diplomasi budaya lokal
			Peningkatan kerja sama di bidang Kebudayaan
			pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan

MISI KEENAM : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Menciptakan dan meningkatkan kualitas produk wisata budaya	Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata budaya
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Sejarah
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Kota dan Desa
		Menciptakan dan meningkatkan kualitas produk wisata alam	Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata alam
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Bahari
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Ekowisata
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Petualangan
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata alam
		Menciptakan dan meningkatkan kualitas produk wisata buatan	Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata buatan
	Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata MICE dan Event		

			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Olah Raga
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Kawasan Terintegrasi
		meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Penciptaan dan Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pariwisata
		Menciptakan dan meningkatkan kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.	Penciptaan dan Peningkatan kualitas Prasarana transportasi
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata
			Peningkatan kesadaran wisata masyarakat
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	pembuatan rekomendasi TDUP dan seni budaya
			pelayanan retribusi pariwisata
			pelayanan sapta pesona pariwisata di destinasi wisata
			pelayanan Keselamatan Wisata Tirta di destinasi wisata
		Mengembangkan pemasaran pariwisata	Peningkatan strategi pemasaran Pariwisata
			Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata
			Pengembangan promosi pariwisata.
			Pengkajian pemasaran pariwisata
			penyusunan calendar event
		mengembangkan kemitraan dan kelembagaan pariwisata	pembinaan usaha pariwisata
			Pengembangan organisasi kepariwisataan dan SDM pariwisata
Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	meningkatkan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
			mengembangkan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif;
			Peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
		membangun dan memperkuat kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif;	penyusunan kebijakan ekonomi kreatif;
		Mengembangkan produk ekonomi kreatif	fasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk kreatif yang bernilai ekonomi
			penyusunan repositories produk ekonomi kreatif
			peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif;
		Mengembangkan pemasaran ekonomi kreatif	pengembangan pemasaran ekonomi kreatif
			peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif;

Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC	Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC	memenuhi kriteria destinasi wisata berkelanjutan oleh GSTC
		Meningkatkan strategi destinasi yang berkelanjutan	peningkatan strategi destinasi yang berkelanjutan
			Pengembangan strategi Destinasi pariwisata berkelanjutan
		Mengembangkan kelembagaan pariwisata berkelanjutan	pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
			Pengembangan Kerjasama Pariwisata Berkelanjutan
			Koordinasi Lintas Sektor Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
			Penyusunan dan penerapan rencana aksi pengembangan pariwisata berkelanjutan
		Meningkatkan pengawasan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dalam hal lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia.	pengawasan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan
		Mengembangkan Destinasi yang menyiapkan sumber daya untuk melakukan mitigasi variabilitas pariwisata musiman	penyiapan sumber daya untuk melakukan mitigasi variabilitas pariwisata musiman
			Peningkatan pengelolaan destinasi wisata pada musim ramai kunjungan
		Mengembangkan Destinasi yang memiliki inventarisasi yang terkini, terse dia bagi masyarakat dan penilaian mengenai aset dan atraksi pariwisata, termasuk situs alam dan budaya.	penyusunan dokumen inventarisasi aset dan atraksi pariwisata
		Meningkatkan pengembangan pariwisata Akses untuk Semua	penerapan sistem akses untuk semua
		meningkatkan Akuisisi Properti	Penyusunan kebijakan kepariwisataan mengenai akuisisi properti
			Penyusunan kebijakan pemerintah mengenai hak ulayat dan masyarakat adat
		meningkatkan Kepuasan Pengunjung	peningkatan sistem pemantauan kepuasan pengunjung
			Pembangunan pusat pelayanan wisatawan
		Meningkatkan standarisasi Keberlanjutan	penerapan Standar Keberlanjutan
			Pengembangan Tanda daftar Usaha Pariwisata
		Meningkatkan Promosi yang akurat	peningkatan promosi pariwisata
			Pengembangan kemitraan pariwisata berkelanjutan
		meningkatkan Kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung dari perekonomian destinasi wisata	Penyusunan Data pengeluaran pengunjung
			Penyusunan data Tingkat Hunian Hotel
		meningkatkan Peluang Kerja untuk Masyarakat Lokal di sektor pariwisata	Pemberdayaan masyarakat lokal
			Sertifikasi kompetensi Kepariwisata

		meningkatkan Opini Masyarakat Lokal Aspirasi, keprihatinan dan kepuasan masyarakat lokal tentang manajemen destinasi	peningkatan kualitas manajemen destinasi wisata
		Mengembangkan Destinasi yang memiliki sistem akses masyarakat lokal kepada situs alam dan budaya	peningkatan akses bagi masyarakat lokal di destinasi wisata
		meningkatkan Fungsi Edukasi Sadar Wisata	peningkatan pemahaman mengenai peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan
		Mengembangkan Destinasi memiliki sistem industri yang berkontribusi terhadap masyarakat dan inisiatif berkelanjutan.	peningkatan dukungan untuk masyarakat sekitar destinasi wisata
			peningkatan dukungan bagi pengusaha lokal dan perdagangan yang adil di sektor pariwisata
		Mengembangkan Destinasi memiliki sistem perdagangan yang adil	peningkatan produk wisata berbasis kearifan lokal
			peningkatan dukungan permodalan bagi para pengusaha
		Mengembangkan Destinasi memiliki kebijakan dan sistem untuk perlindungan atraksi wisata	pengembangan Destinasi memiliki kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi dan melestarikan situs alam dan budaya, termasuk bangunan bersejarah (sejarah dan arkeologi) serta pemandangan pedesaan dan perkotaan
			Analisa Perlindungan Atraksi Wisata
		meningkatkan Pengelolaan Pengunjung	peningkatan sistem pengelolaan perilaku pengunjung
			Mengembangkan Destinasi yang menyediakan dan menerbitkan panduan perilaku pengunjung yang pantas pada situs yang sensitif.
			Penyusunan panduan bagi tour guide
		Meningkatkan sistem perlindungan warisan budaya	Pengembangan Destinasi yang memiliki hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran atau pemberian artefak arkeologi dan bersejarah
			Perlindungan warisan kebudayaan tak berbentuk
		Meningkatkan sistem interpretasi tapak	Pembuatan Informasi interpretatif yang akurat
			pembuatan media interpretasi Tapak
			pembinaan dan pengembangan interpretasi tapak

		meningkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual	peningkatan sistem perlindungan kekayaan intelektual
		Meningkatkan Perlindungan Alam Liar (Flora dan Fauna)	penerapan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2020

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja pihak pertama dan kedua membuat komitmen untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan Bupati Pangandaran Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yg Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BB
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Prosentase pemajuan kebudayaan lokal	70%
3	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	27,5 milyar
4	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	50%
5	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC sektor pariwisata	80%
NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.820.343,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	323.739.943,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	179.472.500,00	APBD
4	Program Pengembangan Industri Kreatif	36.117.500,00	APBD
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.150.000,00	APBD
6	Program Pengembangan Kemitraan	80.000.000,00	APBD
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	16.328.399.971,45	APBD DAN APBN
8	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	1.082.900.014,00	APBD
9	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	344.050.000,00	APBD DAN APBN
10	Program Perlindungan Kebudayaan Lokal	34.800.000,00	APBD

11	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	125.318.800,00	APBD
12	Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal	598.280.000,00	APBD
Total Anggaran Kegiatan		19.900.049.071,45	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

2.4

Tabel Perjanjian Kinerja
Sekretaris dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang diberikan	80%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memiliki kondisi baik	85%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	70%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	85%
NO.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.820.343,00	APBD Kabupaten
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	323.739.943,00	APBD Kabupaten
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	179.472.500,00	APBD Kabupaten

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

2.5

Tabel Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi pariwisata yang dikembangkan	15%
2	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan	80%
NO.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	15.346.374.380,00	APBD Kabupaten & APBN
2	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	914.221.010,00	APBD Kabupaten

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Analisa Data dan Pemasaran dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara	10%
2	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan	80%
NO.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.150.000,00	APBD Kabupaten
2	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	130.029.004,00	APBD Kabupaten

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata	10%
2	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan	80%
3	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	Persentase masyarakat sekitar destinasi wisata yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata	80%
4	Program Pengembangan Industri Kreatif	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru bidang ekonomi kreatif	30%
NO.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Kemitraan	80.000.000,00	APBD Kabupaten
2	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	38.650.000,00	APBD Kabupaten
3	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	344.050.000,00	APBD Kabupaten & APBN
4	Program Pengembangan Industri Kreatif	36.117.500,00	APBD Kabupaten

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Program Perlindungan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	60%
2	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	50%
3	Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	70%
NO.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perlindungan Kebudayaan Lokal	34.800.000,00	APBD Kabupaten
2	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	125.318.800,00	APBD Kabupaten
3	Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal	598.280.000,00	APBD Kabupaten

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan Dana Alokasi Khusus Kementerian Pariwisata. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp 15.825.306.807,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp 13.794.953.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.379.740.193,00 pada perubahan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tanggal 26 September 2020 total belanja sebesar Rp 25.132.530.636,45 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp 19.900.049.071,45 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 5.232.481.565,00. Anggaran belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 19.900.049.071,45, yang berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran sebesar Rp Rp 12.401.635.571,45 dialokasikan ke dalam 13 program. Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 3.786.819.500,00 yang dialokasikan pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan anggaran dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3.711.594.000,00 dialokasikan pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata.

2.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Tabel 2.9

Target Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran APBD Perubahan Tahun 2020

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp 5.232.481.565,00	20,82 %
Belanja Langsung	Rp 19.900.049.071,45	79,18 %
Jumlah	Rp 25.132.530.636,45	100,00 %

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Table 2.10

Anggaran belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	2	3	4
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	1.269.032.786,00	6,38
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	758.398.800,00	3,81
3	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	36.117.500,00	0,18
4	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	16.409.549.971,45	82,46
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC	1.426.950.014,00	7,17
	Jumlah	19.900.049.071,45	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2020

2.4 Instrumen Pendukung

Pada tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, terutama untuk memonitoring pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2020. Program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2020 dimasukkan ke dalam aplikasi yaitu SIPKD dan ROPK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelolaan kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberkan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Table 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76% ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Table 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisas Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BB (70)	A (85,54)	122,20	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	70%	60%	85,71	Tinggi

3	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	50%	45,83%	91,66	Sangat Baik
4	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata	27,5 Milyar	13.786.568.250	50,13	Rendah
5	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	80%	63,41%	79,26	Tinggi

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Dari table di atas terdapat 5 sasaran dengan 5 indikator, pada tahun 2020 ada 2 indikator yang masuk ke dalam kategori sangat baik, 1 indikator yang masuk ke dalam kategori Tinggi, 1 indikator yang masuk ke dalam kategori Rendah dan 1 indikator yang masuk ke dalam kategori Sangat Rendah. Capaian kinerja tertinggi adalah indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar 122,20% dan capaian kinerja terendah adalah Persenta Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata sebesar 50,13%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dicerminkan dalam capaian indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran: Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik

Tolak ukur capaian sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi
1	2	3	4
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kategori penilaian AKIP, yaitu: (1) Sangat memuaskan atau AA dengan range nilai 90-100; (2) Memuaskan atau A dengan range nilai 80-90; (3) Sangat baik atau BB dengan range nilai 70-80; (4) Baik atau B dengan range nilai 60-70; (5) Cukup atau CC dengan range nilai 50-60; (6) Kurang atau C dengan range nilai 30-50; dan (7) Sangat kurang atau D dengan range nilai 0-30.

Kinerja sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d 2020 terhadap target 2021 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	A (84,72)	BB (70)	A (85,54)	122,20	BB (80)	106,93

Formulasi perhitungan:

Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020 dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2019 berdasarkan evaluasi dokumen SAKIP pada tahun sebelumnya. Sumber data surat dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran nomor WAS.05.03/51.b/Insp/2020 tanggal 03 April 2020 perihal laporan hasil evaluasi (LHE) atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
LHE Implementasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	15	13,80
2	Pengukuran Kinerja	12,5	10,00
3	Pelaporan Kinerja	7,5	6,14
Jumlah		35	29,94
Interpertasi Hasil Evaluasi		85,54% (Memuaskan)	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Realisasi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2019 dengan mendapatkan nilai A (85,54%) atau memuaskan capaian kinerja masuk kedalam kategori sangat baik dan capaiakn kinerja tahun 2020 meningkat sebesar 0,82 point dari tahun 2019. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 yang dilakukan pada bulan April 2019 seperti:

1. Perencanaan kinerja di monitoring dan dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti.

2. Dokumen perencanaan kinerja tahunan (rencana aksi) di monitoring dan di evaluasi secara berkala dan di tindaklanjuti.
3. Pengukuran kinerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih secara manual belum mengembangkan/menggunakan teknologi informasi karena keterbatasan sumber daya.
4. Pelaporan kinerja diperbaiki sehingga penyajian laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mendukung sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik terdapat 3 program pendukungnya.

Table 3.6
Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Diberikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.820.343,00
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memiliki Kondisi Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	323.739.943,00
		Cakupan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Baik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	179.362.100,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapatkan pagu 60,35% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mendapatkan persentase terbesar karena merupakan salah satu pendukung utama dalam melaksanakan pekerjaan dan berkinerja.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapatkan pagu 25,51% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dan pengadaan peralatan gedung kantor mendapatkan persentase anggaran yang relatif besar dikarenakan merupakan pemenuhan perlengkapan kantor pada saat adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemic covid-19.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapatkan pagu sebesar 14,14% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem

Informasi Perencanaan Daerah mendapatkan persentase yang sama yang didalamnya merupakan honor operator perencanaan, keuangan, aset dan pendapatan.

Berikut ini kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung sasaran 1 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik.

Table 3.7
Kegiatan Pendukung Sasaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.820.343,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.096.597,00	31,87	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.271.500,00	1,08	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	73.561.300,00	9,61	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	34.800.000,00	4,54	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	105.325.310,00	13,75	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5.571.114,00	0,73	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,65	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.870.000,00	2,07	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	74.075.000,00	9,67	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	116.849.522,00	15,26	
	Penyediaan Jasa Operator Aplikasi	56.200.000,00	7,34	
	Penyediaan Jasa Pengemudi	26.200.000,00	3,42	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	323.739.943,00	100,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	99.200.000,00	30,64	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	91.475.000,00	28,26	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00	3,09	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	73.719.943,00	22,77	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.245.000,00	2,86	
	Pengadaan Komputer	40.100.000,00	12,39	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	179.472.500,00	100,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.085.400,00	2,28	
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	4.387.100,00	2,44	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.500.000,00	0,84	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.500.000,00	0,84	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	42.000.000,00	23,40	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	42.000.000,00	23,40	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	42.000.000,00	23,40	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	42.000.000,00	23,40	

3.2.2 Sasaran: Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu persentase pemajuan kebudayaan lokal.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi		
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dikembangkan	X	100%
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal		

Kinerja sasaran meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal dengan indikator persentase pemajuan kebudayaan lokal pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d 2020 terhadap target 2021 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	50%	70%	60%	85,71	80%	62.50

Formulasi Perhitungan:

Perhitungan persentase pemajuan kebudayaan lokal dihitung dari jumlah objek pemajuan kebudayaan lokal yang dikembangkan dibagi dengan jumlah objek pemajuan kebudayaan lokal. Untuk memajukan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, diperlukan langkah strategis berupa Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek pemajuan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi:

1. Tradisi lisan;
2. Manuskrip;
3. Adat istiadat;

4. Permainan rakyat;
5. Olahraga tradisional;
6. Pengetahuan tradisional;
7. Teknologi tradisional;
8. Seni;
9. Bahasa;
10. Ritus.

Dari target sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut di atas, pada tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan pengembangan dan penanganan 6 (enam) objek pemajuan kebudayaan. Berikut 6 (enam) objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Pangandaran:

1. Ritus seperti pada proses karasemen adat pada kegiatan Hajat Laut yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muhharam;
2. Seni seperti tarian Ronggeng yang dipentaskan pada acara Karnaval Seni Budaya dan Kegiatan di Ruang Publik;
3. Tradisi Lisan seperti cerita tentang Nyai Rengganis yang dilakukan sebelum pementasan tari ronggeng dimulai (dalam penyampaian sinopsis);
4. Pengetahuan Tradisional seperti ketika Karnaval Budaya ada pagelaran busana;
5. Permainan Tradisional seperti Permainan Layang-layang ketika pelaksanaan event Kite Festival dan pengenalan permainan tradisional kepada Finalis Mojang Jajaka (MOKA) Kabupaten Pangandaran untuk dapat disosialisasikan kepada anak-anak sekolah ketika mereka melakukan kegiatan MOKA Goes to School.
6. Manuskrip seperti di Kecamatan Cijulang (bulan Muharam) oleh tokoh masyarakat/adat dilaksanakan tradisi ngabuku tahun dimana kegiatan membaca manuskrip yang disebut Purwaning Jagat.

Dengan realisasi tersebut capaian kinerja persentase pemajuan kebudayaan lokal masuk ke dalam kategori tinggi. Pada tahun 2018 ada 2 obyek pemajuan kebudayaan yang sudah ditangani atau dimajukan secara langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah Seni dan Ritus, terdapat kenaikan atau percepatan pencapaian kinerja sebanyak 3 objek pemajuan kebudayaan tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 1 objek yaitu manuskrip yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Cijulang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam hal ini membantu menginventarisasi dan mentransliterasi naskah kuno ke dalam

bahasa Indonesia. Pada tahun 2020 setelah pada bulan Maret diumumkan tentang Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia banyak hal yang difokuskan dan banyak kegiatan yang dibatasi, hal tersebut juga berpengaruh pada capaian kinerja sasaran strategis 2 yakni persentase objek pemajuan kebudayaan lokal. Sehingga pada tahun 2020 objek pemajuan yang dikembangkan yakni hanya manuskrip.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebanyak 80% pemajuan kebudayaan maka masih ada 20% atau 2 objek pemajuan yang harus ditangani dan dikembangkan.

Beberapa faktor penghambat terhadap capaian target tahun 2020 antara lain:

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang mengharuskan semua kalangan untuk membatasi kegiatan berkerumun sehingga banyak kegiatan kebudayaan yang dibatalkan;
2. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk menginventarisir dan mengklasifikasikan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten;

Beberapa faktor pendukung untuk mencapai target akhir resntra antara lain:

1. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pangandaran yang masih memegang teguh tradisi, adat istiadat dan budaya lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
2. Para pelaku budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran banyak yang masih hidup sehingga masih dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya;
3. Generasi muda mulai banyak yang peduli dan menggali serta mau mempelajari seni dan budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran. Mereka secara perlahan dapat mengapresiasi seni dan kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Untuk mendukung sasaran 2 Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal terdapat 3 program pendukungnya.

Table 3.10
Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Prosentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi	Program Pelindungan Kebudayaan Lokal	Rp 34.800.000,00
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	Rp 125.318.800,00
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dimanfaatkan	Program Pemanfaatan Kebudayaan lokal	Rp 598.280.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

1. Program Pelindungan Kebudayaan Lokal mendapatkan pagu 4,59% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 2. Program ini didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dengan focus pendataan dan inventarisasi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran yang di data setiap Tahun.
2. Program Pengembangan Kebudayaan Lokal mendapatkan pagu 16,52% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 2. Pengayaan Keberagaman Kebudayaan Lokal mendapatkan persentase terbesar yang didalamnya meruapakan pembelian alat musik.
3. Program Pemanfaatan Kebudayaan lokal mendapatkan pagu sebesar 78,89% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 2. Kegiatan Diplomasi kebudayaan mendapatkan persentase terbesar dalam rangka penyebarluasan kebudayaan di setiap kecamatan.

Berikut ini kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung sasaran 2 Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal.

Table 3.11
Kegiatan Pendukung Sasaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pelindungan Kebudayaan Lokal	34.800.000,00	100,00	
	Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	34.800.000,00	100,00	
2	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	125.318.800,00	100,00	
	Kajian Kebudayaan lokal	10.560.000,00	8,43	
	Pengayaan keberagaam kebudayaan lokal	114.758.800,00	91,57	
3	Program Pemanfaatan Kebudayaan lokal	598.280.000,00	100,00	
	Pengembangan inovasi kebudayaan lokal	245.800.000,00	41,08	
	Diplomasi Kebudayaan	302.480.000,00	50,56	
	Peningkatan kerjasama Kebudayaan	10.000.000,00	1,67	
	Penyelenggaraan Event Budaya	40.000.000,00	6,69	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pendukung sasaran sasaran 2 Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal:



Gambar 3.2 Kegiatan Safari Budaya atau Diplomasi Kebudayaan



Gambar 3.3 AKB Pelaku Seni

3.2.3 Sasaran: Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu persentase pengembangan ekonomi kreatif. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi		
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kre atif Yang Dibina	X	100%
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		

Kinerja sasaran meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif dengan indikator persentase pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d 2020 terhadap target 2021 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	39,58%	50%	45,83%	91,66	70%	0.66

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terbagi ke dalam 16 subsektor, diperlukan sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik dengan daya inovatif dan kreativitas yang tinggi. Selain sumber daya manusia tentu hal-hal lain juga diperlukan dalam pengembangan tersebut seperti alat dan wadah untuk sumber daya manusia tersebut berkreasi. Kebijakan bidang ekonomi kreatif sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 yaitu aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Dari hasil analisa persentase pengembangan ekonomi kreatif yang dicapai pada Tahun 2020 sebesar 45,83 % dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{110}{240} \times 100\% = 45,83\%$$

Dari 240 pelaku ekonomi kreatif yang berada di Kabupaten Pangandaran yang terdata sampai dengan Tahun 2018. Pada tahun 2018 yang telah dibina sebanyak 65 orang dan 30 orang pada tahun 2019 dan 15 orang pada tahun 2020 apabila dijumlahkan pelaku ekonomi kreatif yang telah dibina sampai tahun 2020 sebanyak 110 orang, jadi capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 91,66% masuk ke dalam kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 ada penurunan capaian sekitar 15 orang dan apabila dibandingkan dengan periode akhir renstra masih sekitar 58 pelaku yang belum dibina atau sekitar 24,17%. Penurunan capaian pada tahun 2020 dikarena sumber daya yang

dimiliki belum bisa mendukung secara optimal pada sasaran meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif.

Beberapa faktor penghambat terhadap capaian yang melebihi target pada tahun 2020 antara lain:

1. Dampak pandemic covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 sampai saat ini;
2. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga dukungan untuk pelaku ekonomi kreatif belum bias diberikan secara maksimal;

Untuk mendukung sasaran 3 Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif terdapat 2 program pendukungnya.

Table 3.14

Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru Bidang Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Industri Kreatif	Rp 36.117.500,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

1. Program Pengembangan Industri Kreatif mendapatkan pagu 100% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 3. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pembinaan Pelaku Usaha Kreatif dan pengembangan investasi industry kreatif, pembinaan ini dilakukan kepada 15 pelaku usaha kreatif yang sudah terdata.

Berikut ini kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung sasaran 3 Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif:

Table 3.15

Kegiatan Pendukung Sasaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Industri Kreatif	36.117.500,00	100,00	
	Pembinaan pelaku usaha kreatif	15.367.500,00	42,55	
	pengembangan investasi industri kreatif	20.750.000,00	57,45	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Berikut dokumentasi kegiatan untuk mendukung sasaran 3 Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif:



Gambar 3.4 Pembinaan Pelaku Kreatif



Gambar 3.5 Pembinaan Pelaku Kreatif

3.2.4 Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya pengembangan kepariwisataan lokal diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu jumlah PAD dari sektor pariwisata.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi		
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata	Jumlah dari setiap jenis kendaraan/orang yang masuk ke 5 DTW	X	Harga tiket dari masing-masing jenis kendaraan/orang

Kinerja sasaran meningkatnya pengembangan kepariwisataan dengan indikator jumlah PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d 2020 terhadap target 2021 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata	73,89%	27,5 Milyar	13.786.568.250	50,13	30 M	0.46

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata (retribusi wisata) dihitung berdasarkan jumlah dari setiap jenis kendaraan/orang yang masuk ke 5 daya tarik wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dikalikan dengan harga tiket dari masing-masing jenis kendaraan/orang, adapun jumlah PAD sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.18
Jumlah PAD Sektor Pariwisata

NO	DAYA TARIK WISATA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020
1	Pantai Pangandaran	13.326.055.000	10.185.207.500
2	Pantai Karapyak	941.513.000	988.259.500
3	Pantai Batukaras	2.604.620.000	1.746.387.500
4	Pantai Batuhiu	902.520.000	321.150.000
5	Green Canyon	698.150.000	545.563.750
	Jumlah	18.472.858.000	13.786.568.250

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Kabupaten Pangandaran memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, dari mulai potensi wisata alam, budaya dan buatan. Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, baru 5 (lima) daya tarik wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan menjadi sumber PAD sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran, kelima daya tarik wisata tersebut adalah :

1. Pantai Karapyak yang berada di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
2. Pantai Pangandaran yang berada di wilayah tiga Desa yaitu Desa Pananjung, Desa Pangandaran dan Desa Cikembulan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
3. Pantai Batuhiu yang berada di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
4. Green Canyon yang berada di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran
5. Pantai Batukaras yang berada di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Pada tahun 2020 target PAD dalam Renstra sebesar Rp. 27.500.000.000,00 namun didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 target PAD sebesar Rp. 11.000.000.000,00 . Jumlah PAD dari sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran sampai tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 13.786.568.250,00, dengan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 50,13% dengan kategori rendah dan apabila dibandingkan dengan target DPPA Tahun 2020 sebesar 125,33% dengan kategori pencapain sangat baik. Terjadi penurunan jumlah PAD pada tahun 2020 sebanyak Rp 4.686.289.750,00 dibandingkan dengan tahun 2019, hal tersebut karena pengaruh bencana non alam yakni pandemic covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Akibat dari pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran, adapun beberapa peraturan yang diterapkan pada tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi covid-19 antara lain:

1. SE Bupati Pangandaran Nomor: 060/991.Org/2020 Tanggal 18 Maret 2020
Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease – 19 (COVID-19)
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. SE Bupati Pangandaran Nomor: 443/146/BPBD/2020 Tanggal 30 Maret 2020
Tentang Perpanjangan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease – 19
(COVID-19) Di Kabupaten Pangandaran;
3. SE Bupati Pangandaran Nomor: 443/1094/BPBD/2020 Tanggal 13 April 2020
Tentang Perpanjangan Kedua Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease
– 19 (COVID-19) Di Kabupaten Pangandaran:
4. SE Bupati Pangandaran Nomor: 060/1178.SETDA/2020 Tanggal 28 April 2020
Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease – 19 (COVID-19) Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran:
5. SK Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.148-Huk/2020 Tanggal 5 Mei 2020
Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka
Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease – 19 (COVID-19) Di Kabupaten
Pangandaran;
6. SE Bupati Pangandaran Nomor: 443/1313/BPBD/2020 Tanggal 19 Mei 2020
Tentang Perpanjangan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease – 19
(COVID-19) Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten
Pangandaran:
7. SK Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.178-Huk/2020 Tanggal 4 Juni 2020
Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara
Proporsional Di Kabupaten Pangandaran.

Selain karena pandemi covid-19 banyak hal yang mempengaruhi ketidaktercapaian Jumlah PAD Sektor Pariwisata tersebut, diantaranya :

1. Wisatawan sebagian besar mengetahui Pangandaran sebagai destinasi wisata yang mengandalkan daya tarik wisata pantai dan bahari, padahal ada banyak daya tarik wisata lainnya seperti kebudayaan masyarakat, kuliner, wisata petualang, wisata gua, wisata desa dan lain sebagainya;
2. Terbatasnya aksesibilitas, seperti sarana dan prasarana atau pilihan moda transportasi menuju Kabupaten Pangandaran dan didalam destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran;
3. Ketidakmerataan pengembangan fasilitas wisata di destinasi wisata seperti ketersediaan akomodasi menimbulkan penumpukan wisatawan di satu destinasi wisata yaitu Pantai Pangandaran dan kurangnya ketersediaan lahan parkir yang aman dan nyaman terutama di Pantai Pangandaran menjadi salah satu penyebab kemacetan ketika volume kendaraan naik pada liburan panjang seperti libur hari raya, tahun baru dan libur sekolah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan event-event wisata yang bersifat viral dan massif baik dalam skala nasional ataupun internasional yang mampu menarik wisatawan baik pada musim liburan ataupun musim sepi kunjungan;
5. Banyaknya informasi isu-isu bencana dan berita hoax yang belum optimal dalam penanganannya, ditambah lagi dengan kondisi alam yang tidak menentu mempengaruhi psikologi wisatawan dalam memutuskan untuk berkunjung ke Kabupaten Pangandaran.

Solusi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan cara menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan, serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Pembangunan destinasi wisata berupa pengembangan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mempermudah pergerakan wisatawan menuju ke Kabupaten Pangandaran dan destinasi pariwisata dilakukan dengan cara peningkatan aksesibilitas berupa prasarana, sarana, dan sistem transportasi.
3. Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

4. Mengembangkan investasi pariwisata dengan menerapkan sejumlah strategi di antaranya memberikan insentif, kemudahan, serta melakukan promosi investasi.
5. Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan, ketika wisatawan puas dengan destinasi wisata yang kita tawarkan, kemungkinan besar mereka akan berkunjung kembali dan loyal dengan destinasi wisata kita dan akan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain (promosi dari mulut ke mulut).
6. Setelah kedaan kembali seperti semula mengembangkan pengelolaan destinasi wisata musiman dengan menciptakan event-event yang bersifat viral dan massif yang dapat menarik wisatawan untuk datang pada musim sepi kunjungan dan musim libur. Selain itu juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengelola destinasi wisata pada musim ramai kunjungan sehingga wisatawan yang datang merasa puas akan pelayanan kepariwisataan yang diberikan dan pada akhirnya ingin berkunjung kembali dengan mengajak teman dan saudaranya.
7. Mengembangkan sistem informasi terpadu dimana setiap orang akan lebih mudah mengakses informasi seputar kepariwisataan Pangandaran sehingga isu-isu negative dan informasi yang tidak benar dapat diminimalisir. Selain itu juga mengembangkan system respon cepat pemberian informasi dan klarifikasi akan suatu pemberitaan yang merugikan sehingga semua orang mengetahui hal yang sebenarnya tanpa termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan merugikan semua pihak.

Untuk mendukung sasaran 4 Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata terdapat 3 program pendukungnya.

Table 3.19
Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 1.150.000,00
		Persentase Destinasi Wisata Yang Berkembang	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 16.328.399.971,45
		Persentase Peningkatan Kerjasama Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 80.000.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata mendapatkan pagu 0,01% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 4. Program ini didukung oleh satu kegiatan yaitu pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapatkan pagu 99,51% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 4. Kegiatan yang mendapatkan pagu tersebar adalah Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata(DAK) sebanyak 20,62% yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia diperuntukan untuk penataan di Pantai Karapyak.
3. Program Pengembangan Kemitraan mendapatkan pagu 0,49% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 4. Didukung oleh satu kegiatan yakni pembinaan organisasi kepariwisataan adapun yang dibina dalam organisasi Himpunan Pemandu Indonesia Tingkat Kabupaten Pangandaran dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Tingkat Kabupaten Pangandaran.

Berikut ini kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung sasaran 4 Meningkatkan Pengembangan Kepariwisataaan:

Table 3.20
Kegiatan Pendukung Sasaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.150.000,00	100,00	
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	1.150.000,00	100,00	
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	16.328.399.971,45	100,00	
	Pelayanan Retribusi Pariwisata	2.427.400.000,00	14,87	
	Pelayanan Sapta Pesona Pariwisata	215.250.000,00	1,32	
	Pelayanan Keselamatan Wisata Tirta	1.200.230.880,00	7,35	
	Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata	24.800.000,00	0,15	
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata(DAK)	3.367.544.000,00	20,62	
	Penataan Kawasan Pantai Karapyak (19)	982.025.591,45	6,01	
	Pengembangan Destinasi Wisata (Penataan Kawasan Pantai Barat dan Timur Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel. PANGANDARAN, Kec. PANGANDARAN, Kab. Pangandaran) (Banprov)	651.277.000,00	3,99	
	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel. PANGANDARAN, Kec. PANGANDARAN, Kab. Pangandaran) (Banprov)	364.557.500,00	2,23	

	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Cikembulan Kecamatan Sidamulih) (Desa Cikembulan, Kel. CIKEMBULAN, Kec. SIDAMULIH, Kab. Pangandaran) (Banprov)	484.287.500,00	2,97	
	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Timur Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel. PANGANDARAN, Kec. PANGANDARAN, Kab. Pangandaran) (Banprov)	308.777.500,00	1,89	
	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Karapyak Kecamatan Kalipucang) (Desa Bagolo, Kel. BAGOLO, Kec. KALIPUCANG, Kab. Pangandaran) (Banprov)	494.452.500,00	3,03	
	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Batuhui Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel. CILIANG, Kec. PARIGI, Kab. Pangandaran) (Banprov)	494.452.500,00	3,03	
	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Batuhui Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel. CILIANG, Kec. PARIGI, Kab. Pangandaran) (Banprov)	494.452.500,00	3,03	
	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Batukaras Kecamatan Cijulang) (Desa Batukaras, Kel. BATUKARAS, Kec. CIJULANG, Kab. Pangandaran) (Banprov)	494.562.500,00	3,03	
	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan Pada Masa Pandemi Covid-19	240.500.000,00	1,47	
	Peningkatan Infrastruktur IT AKB	4.083.830.000,00	25,01	
3	Program Pengembangan Kemitraan	80.000.000,00	100,00	
	Pembinaan organisasi kepariwisataan	80.000.000,00	100,00	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Berikut beberapa Dokumentasi Kegiatan pendukung Sasaran 4 Meningkatnya Pengembangan Kepariwisataaan.



Gambar 3.6 Penataan Pantai Karapyak (DAK)



Gambar 3.7 Penataan Pintu Tol Gate

3.2.5 Sasaran : Berkembangnya Destinasi Wisata Untuk Memperoleh Pengakuan GSTC

Tolak ukur capaian sasaran berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi		
1	2	3	4		
1	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	Jumlah Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata yang Mempunyai Kriteria Baik	X	100%
			Jumlah Total Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata		

Kinerja sasaran berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC dengan indikator persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata.pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d 2020 terhadap target 2021 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	63,41%	80%	63,41%	79,26	100%	63.41

GSTC-D diciptakan dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman umum tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria GSTC-D merupakan upaya minimum yang perlu dicapai oleh setiap organisasi manajemen pariwisata ketika mempertimbangkan keberlanjutan dalam praktik mereka. Untuk memenuhi definisi pariwisata berkelanjutan, destinasi harus mengambil pendekatan interdisipliner, holistik dan integratif yang meliputi empat tujuan utama yaitu :

1. Mendemonstrasikan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan;
2. Memaksimalkan manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negatif;
3. Memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, pengunjung dan budaya, serta meminimalkan dampak negatif;
4. Memaksimalkan manfaat bagi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif.

Kriteria GSTC-D dirancang untuk dapat digunakan oleh semua jenis dan skala destinasi. Lokasi yang dijadikan target destinasi berkelas dunia sesuai dengan kriteria GSTC Destination (GSTC-D) yaitu Kawasan Wisata Pantai Pangandaran.

Pada tahun 2016 dilakukan Pangandaran Sustainable Tourism Destination Snapshot Evaluation dengan menggunakan Global Sustainable Tourism Criteria for Destination (version 1,1 November 2013) combined with Suggested performance Indicators (version 1,10 Desember 2013) untuk menilai sejauh mana Kawasan Wisata Pangandaran memenuhi kriteria GSTC-D sehingga terlihat sejauh mana kesiapan Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi berkelas dunia. Dari 41 kriteria yang dievaluasi Kawasan Wisata Pangandaran memperoleh nilai sebagai berikut :

1. Terdapat 4 kriteria yang tidak dievaluasi dikarenakan tidak cukup data untuk dievaluasi yaitu :
 - a. Akuisisi Properti;
 - b. Promosi;
 - c. Pelindungan Warisan Budaya;
 - d. Perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. 17 kriteria yang dinilai sudah baik yaitu :
 - a. Manajemen Organisasi (DMO);
 - b. Pengelolaan Pariwisata Musiman;
 - c. Inventarisasi Aset dan Atraksi Pariwisata;
 - d. Keselamatan dan Keamanan;
 - e. Manajemen krisis dan Kedaruratan;

- f. Peluang Kerja untuk Masyarakat Lokal;
 - g. Partisipasi Masyarakat;
 - h. Opini Masyarakat Lokal;
 - i. Akses Bagi Masyarakat Lokal;
 - j. Pencegahan Eksploitasi;
 - k. Dukungan Untuk Masyarakat;
 - l. Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan Yang Adil;
 - m. Pelindungan Atraksi Wisata;
 - n. Perilaku Pengunjung;
 - o. Pelindungan Lingkungan Sensitif;
 - p. Pelindungan Alam Liar (Flora dan Fauna);
 - q. Polusi Cahaya dan Suara.
3. 11 kriteria dimana perencanaan sudah ada tetapi implementasi belum maksimal:
- a. Strategi Destinasi Berkelanjutan;
 - b. Pengaturan Perencanaan;
 - c. Akses Untuk Semua;
 - d. Kepuasan Pengunjung;
 - e. Pemantauan Ekonomi;
 - f. Fungsi Edukasi Sadar Wisata;
 - g. Pengelolaan Pengunjung;
 - h. Interpretasi Tapak;
 - i. Konservasi Energi;
 - j. Pengelolaan Air;
 - k. Keamanan Air.
4. 9 kriteria yang belum ada dan belum dikembangkan yaitu :
- a. Monitoring;
 - b. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim;
 - c. Standar Keberlanjutan;
 - d. Resiko Lingkungan;
 - e. Emisi Gas Rumah Kaca;
 - f. Kualitas Air;
 - g. Limbah Cair;
 - h. Mengurangi Limbah Padat;
 - i. Transportasi Ramah Lingkungan.

Dari hasil analisa di atas maka persentase pemenuhan kriteria GSTC-D yang dicapai sampai Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia sebesar 41,46 % dimana Dari 41 kriteria GSTC-D yang dievaluasi di Kabupaten Pangandaran memperoleh 17 kriteria GSTC-D yang dianggap baik. Adapun perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{17}{41} \times 100 \% = 41,46 \%$$

Pada tahun 2019 setidaknya ada 2 kriteria yang berusaha dipenuhi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu:

1. Akses Untuk Semua;
2. Pengelolaan Pengunjung.

Sedangkan sampai Tahun 2018 setidaknya ada 7 kriteria GSTC-D yang berusaha untuk dipenuhi meliputi :

1. Promosi;
2. Perlindungan Warisan Budaya;
3. Strategi Pengembangan Destinasi Berkelanjutan;
4. Kepuasan Pengunjung;
5. Fungsi Edukasi dan sadar wisata;
6. Monitoring;
7. Regulasi Perencanaan.

Jika dianalisis dan dievaluasi ulang, dengan adanya penambahan pemenuhan 2 kriteria GSTC-D, maka kondisi pencapaian pemenuhan GSTC-D sampai tahun 2019 dengan menggunakan penilaian mandiri diharapkan dapat mengalami kenaikan menjadi 26 kriteria dengan kategori baik sehingga capaiannya menjadi sebesar 63,41%.

Agar mencapai target pemenuhan kriteria GSTC-D 100% pada tahun 2021 maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama dukungan lintas sektor. Salah satu strategi yang dapat mempercepat pemenuhan kriteria dimaksud adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menjadikan destinasi wisata Pantai Pangandaran berkelas dunia merujuk pada kriteria GSTC-D. Pada tahun 2019 daya Tarik wisata alam Green Canyon mendapatkan penghargaan Green Bronze dalam ajang ISTA yang kriteria dan indikator penilaiannya diadopsi dari kriteria dan indikator GSTC-D.

Pada tahun 2020 kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D yakni pembentukan tim percepatan pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D yang dilaksanakan oleh Bidang Destinasi Pariwisata.

Adapun faktor penghambat pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pegawai tentang GSTC-D belum menyeluruh sehingga;
2. Banyaknya indikator dan kriteria yang harus dipenuhi dan tersebar hampir diseluruh SKPD yang ada di Kabupaten Pangandaran sedangkan pembentukan tim secara resmi baru dilakukan tahun 2020;
3. Sumber daya untuk pemenuhan indikator dan kriteria GSTC-D masih terbatas.

Untuk mendukung sasaran 5 Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC terdapat 2 program pendukungnya.

Table 3.23
Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	Persentase SDM Pengelola Yang Memahami Prinsip-prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Rp 1.082.900.014,00
		Persentase Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Yang Memperoleh Manfaat Ekonomi dari Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	Rp 344.050.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

1. Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mendapatkan pagu 75,61% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 5. Kegiatan yang mendapatkan pagu terbesar adalah kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (akses untuk semua) sebesar 62,33% yang didalamnya pengembangan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.
2. Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata mendapatkan pagu 24,39% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 5. Kegiatan yang mendapatkan pagu tersebar adalah Bimtek Pengembangan SDM Bidang Pariwisata (DAK) sebesar 100% merupakan kegiatan yang didalamnya ada pelatihan SDM di bidang pariwisata.

Berikut ini kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung sasaran 5 Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC:

Table 3.24
Kegiatan Pendukung Sasaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	1.082.900.014,00	100,00	
	Pembentukan Tim Koordinasi persiapan Penilaian GSTC-D	45.000.000,00	4,16	
	Penyelenggaraan Event pariwisata di musim sepi kunjungan	5.287.004,00	0,49	
	Penyusunan Database kepariwisataan	55.517.000,00	5,13	
	Analisa kepuasan wisatawan	4.625.000,00	0,43	
	Pengembangan Tanda daftar Usaha Pariwisata	38.650.000,00	3,57	
	Pembuatan Media Promosi	64.600.000,00	5,97	
	Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata	194.243.260,00	17,94	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (akses untuk semua)	674.977.750,00	62,33	
2	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	344.050.000,00	100,00	
	Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata(DAK Non Fisik)	344.050.000,00	100,00	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

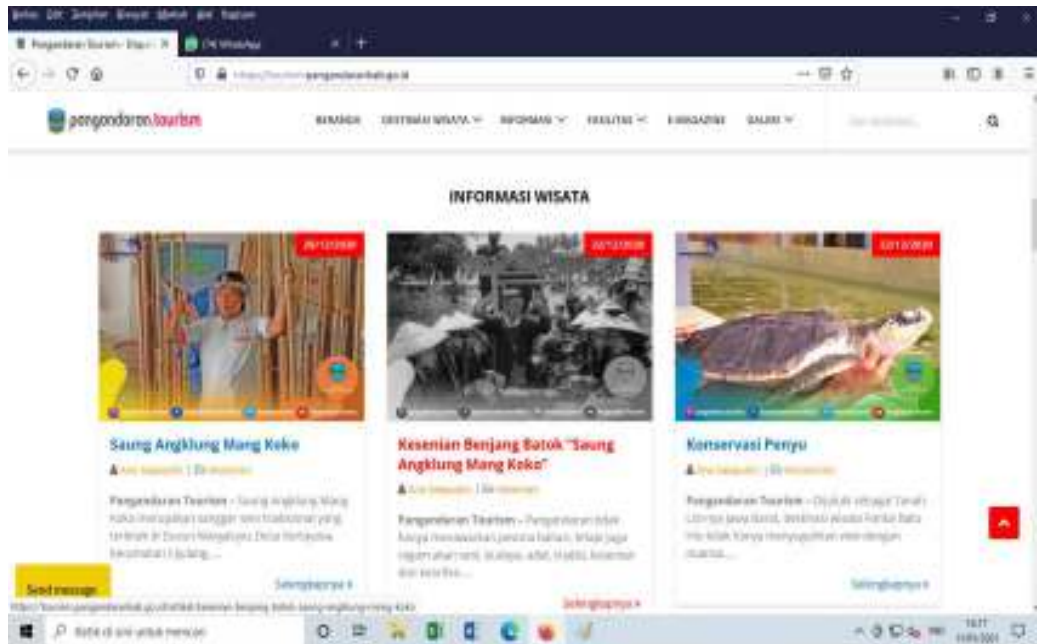
Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pendukung sasaran 5 Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC.



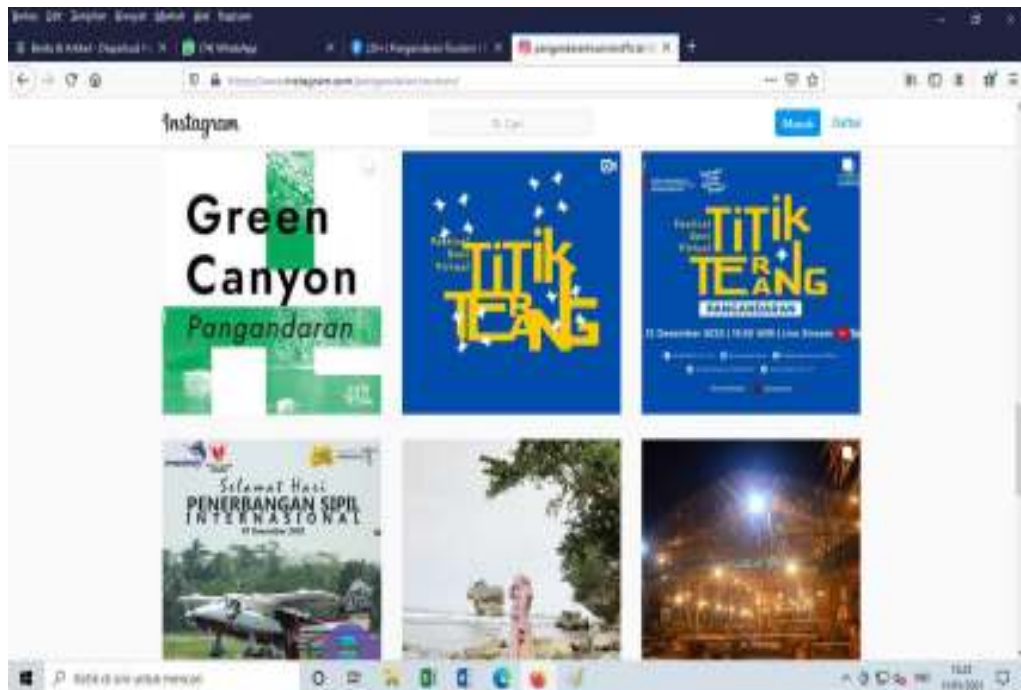
Gambar 3.8 Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penilaian GSTC-D



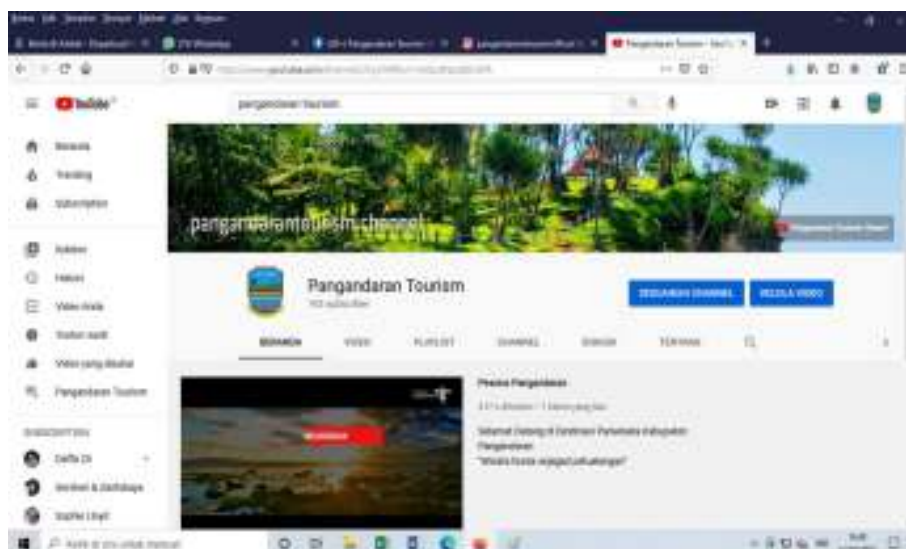
Gambar 3.9 Kegiatan Persiapan Pembentukan Tim Penilaian GTSC-D



Gambar 3.10 Website Promosi Pariwisata



Gambar 3.11 Media Sosial Promosi Pariwisata



Gambar 3.12 Youtube Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Gambar 3.13 Riset Analisa Kepuasan Wisatawan

Beberapa program dan kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata secara tidak langsung saling mendukung sasaran yang ada, seperti pembuatan media promosi pada sasaran 5 mendukung secara tidak langsung terhadap sasaran 3 yaitu jumlah PAD sektor pariwisata, kegiatan diplomasi kebudayaan di sasaran 2 mendukung secara tidak langsung pada acara musim sepi kunjungan pada sasaran 5 dan kegiatan Penataan Pantai Barat Pangandaran mendukung akses untuk semua pada sasaran 5.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 76,12% dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Table 3.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		Realisasi (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6			7
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BB (70)	A (85,54)	122,20	1.269.032.786,00	1.201.659.022,00	94,69
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	70%	60%	85,71	758.398.800,00	757.503.800,00	99,88
3	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	50%	45,83%	91,66	36.117.500,00	34.632.500,00	95,89
4	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata	27,5 Milyar	13.782.568.250	50,13	16.409.549.971,45	11.755.647.172,00	71,64
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	80%	63,41%	79,26	1.426.950.014,00	1.397.856.028,00	97,96
Jumlah						19.900.049.071,45	15.147.298.522,00	76,12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Berikut table efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target tahun 2020.

Table 3.26
Analisis Efektivitas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	Selisih (Realisasi-Target) (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BB (70)	A (85,54)	5,31	122,20

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya $\geq 100\%$)

Analisis Efektivitas:

Dari 5 sasaran strategis, 1 sasaran telah mencapai atau melebihi target dengan tingkat efektivitas sebagai berikut:

1. Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik target di tahun 2020 nilai BB atau 70, realisasi kinerja mendapatkan nilai A atau 85,54 yang berarti melampaui target dengan selisih antara target dan realisasi sebesar 22,20%. Tindakan lanjut rekomendasi laporan hasil evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya secara efektif telah membantu pencapaian target pada tahun 2020;

2.

Table 3.27
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%) lebih dari 100%	Penyerapan Anggaran (%)	Sisa Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	122,20	94.69	5.31

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya $\geq 100\%$ dengan penyerapan anggaran $\leq 100\%$)

Analisis Efisiensi:

Dari 5 sasaran strategis, 1 sasaran mencapai atau melebihi target yang kinerjanya sudah melebihi target dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran terwujudnyaa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik melampaui target kinerja sebesar 122,20 % dengan sisa anggaran atau tingkat efisiensi sebsar 5,31% dari total anggaran. Efisiensi anggaran dilakukan dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2020 merupakan tahun ke-3 menggunakan sasaran dan indikator pada perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak yang harapannya untuk ke depan akan lebih baik dan ditingkatkan. Sementara itu, target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang digambarkan pada pencapaian target indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki;
2. Dari 5 sasaran 1 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan melampaui target capaian lebih dari 100%, 1 indikator sangat baik namun capaiannya kurang dari 100%, 2 indikator masuk ke dalam capaian dengan kategori tinggi dan 1 indikator masuk ke dalam capaian dengan kategori rendah.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada, mempertahankan dan meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tentang SAKIP, serta kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel;
2. Perlu ditingkatkan kualitas inventarisasi objek pemanjuaan kebudayaan lokal sampai pada klasifikasi yang sudah memiliki dan regulasi yang jelas;
3. Perlu dibuat sistem yang cepat tanggap terutama dalam mengatasi berita hoax dan isu-isu negative supaya wisatawan cepat mendapatkan informasi terbaru;
4. Perlu adanya pengembangan variasi daya tarik wisata selain daya tarik wisata bahari dan pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata yang memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan;

5. Perlu update data 16 subsektor ekonomi ekonomi kreatif dan pelakunya untuk lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pangadaran;
6. Perlu adanya rencana aksi yang fokus dan komitmen dari semua SKPD dalam upaya pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D supaya semua kriteria dan indikator bisa masuk kategori green pada saat assessment.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangadaran



UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004